

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL MILIK KORPORASI ASING DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN TINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Nama : Nelly Debora Agustina Limbong

NRP: 1487096

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan dalam bentuk satu kesatuan yang harus dijaga keamanannya dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadikan Indonesia harus lebih ekstra dalam hal menjaga kedaulatannya dalam rangka mengurangi masuknya kapal asing yang mencuri sumber daya alam laut di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP) telah mengambil kebijakan tegas untuk memberantas *illegal fishing*, yaitu penenggelaman kapal milik korporasi asing. Dalam hal ini yang dapat dituntut tidak hanya mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka seorang terdakwa *illegal fishing* sudah dianggap bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dianggap sudah bersalah maka kapal milik korporasi asing yang digunakan untuk melakukan *illegal fishing*, langsung dibakar atau ditenggelamkan tanpa ada proses hukum terlebih dahulu. Identifikasi Masalah dalam penelitian adalah Bagaimana konsistensi penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan Bagaimana pertanggungjawaban korporasi asing atas terjadinya tindakan *illegal fishing* berdasarkan sistem hukum Indonesia

Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder, terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan *illegal fishing*. Hasil penelitian menunjukkan, proses hukum acara pidana terhadap penenggelaman kapal di Indonesia sudah sesuai, akan tetapi pada tindakan di lapangan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Di Indonesia, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi, telah diatur dalam Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, tetapi belum ada diaturnya pelaku korporasi asing sebagai subjek hukum, karena Perma No 13 Tahun 2016 daya jangkauannya masih sebatas lokal saja sehingga korporasi asing belum dapat dikenakan sanksi pidana.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah asas praduga tak bersalah berarti bahwa walaupun seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dalam penelitian ini subjek yang dituju adalah korporasi yang ada di luar negeri, sehingga sulit bagi para penegak hukum dapat menjerat korporasi asing untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dan diadili di Indonesia. Untuk dapat mempermudah dalam menjerat korporasi asing, penegak hukum bisa menggunakan *Mutual Legal Assistance*. Saran dalam penelitian ini adalah Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala. Dalam kasus penenggelaman kapal korporasi asing, secara teori pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan kepada korporasi asing, tetapi secara teknis masih ada kesulitan dalam menjerat dan mengadili korporasi asing Indonesia karena kekosongan hukum, yang mana perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga diperlukan sebuah payung hukum untuk dapat menjerat korporasi asing yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia

Kata kunci: Penenggelaman Kapal, Korporasi Asing, *Illegal Fishing*, Pertanggungjawaban Pidana, Asas Praduga Tak Bersalah

JURIDICAL REVIEW OF THE COMPOUNDING OF SANCTIONS OF FOREIGN CORPORATE SHOPPING AND FOREIGN CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY THAT ILLEGAL FISHING MEASURES IN INDONESIAN WATER AREAS RELATED TO PRADUALLY ASSOCIATED PRIVATE

Nama : Nelly Debora Agustina Limbong

NRP: 1487096

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago in the form of a unit that must be safeguarded and utilized for the people's prosperity. This makes Indonesia more extra in terms of maintaining its sovereignty in order to reduce the entry of foreign ships that steal the natural resources of the sea in Indonesia. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (hereinafter referred to as the KKP) has taken a firm policy to eradicate illegal fishing, namely sinking ships belonging to foreign corporations. In this case what can be prosecuted is not only those who are direct actors in the field, but also corporations who are behind them. Based on sufficient preliminary evidence, a defendant of illegal fishing is considered guilty without a court decision that has permanent legal force. Because they are considered guilty, foreign-owned vessels used to do illegal fishing are immediately burned or drowned without prior legal proceedings. Identification of the problem is how the consistency of the sanctions for sinking ships belonging to foreign corporations that carry out illegal fishing in Indonesian waters is associated with the principle of presumption of innocence and how the responsibility of foreign corporations for illegal fishing is based on the Indonesian legal system

The research method is normative juridical which will explore from various secondary literature, consisting of legislation, regulations, books, journals and papers relating to illegal fishing. The results of the study show that the criminal procedure process for sinking ships in Indonesia is appropriate, but on the ground action is against the principle of presumption of innocence. In Indonesia, to be asked for corporate criminal responsibility, it has been regulated in Perma No. 13 of 2016 concerning procedures for handling criminal cases by corporations, but there has not yet been regulated foreign corporate actors as legal subjects, because Perma No 13 of 2016 has limited local power only so that foreign corporations cannot be subject to criminal sanctions.

The conclusion this research is is that in fact, principle of presumption of innocence means that even if someone is suspected of committing a criminal offense with sufficient evidence, and ultimately punished, they must still be respected for their human rights. In this study, the intended subject is corporations that are abroad, so it is difficult for law enforcers to ensnare foreign corporations to be held accountable and tried in Indonesia. In order to make it easier to ensnare foreign corporations, law enforcers can use Mutual Legal Assistance. Suggestions in this study are that Enforcement and the application of law, especially in Indonesia, often face obstacles. In the case of sinking foreign corporate ships, criminal theory can be applied theoretically to foreign corporations, but technically there are still difficulties in ensnaring and prosecuting Indonesian foreign corporations due to legal vacancies, where the development of society is faster than the development of statutory regulations, so that a legal umbrella to be able to ensnare foreign corporations that commit crimes in Indonesian waters.

Keywords: The Ship Scuttling, Foreign Corporation, Illegal Fishing, Criminal Liability, Presumption Of Innocence

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	26
4. Jenis Data.....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Teknik Analisis Data	29
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II.....	33
TINJAUAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM	33
PENANGKAPAN IKAN	33
A. Pengaturan Kegiatan Perikanan dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	33

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	33
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	35
B. Aspek Hukum Tindakan <i>Illegal Fishing</i>	38
1. Pengertian dan Klasifikasi <i>Illegal Fishing</i>	38
2. <i>Illegal Fishing</i> Sebagai Sebuah Tindak Pidana	47
C. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan	51
1. Hukum Pidana Materiil	51
2. Proses Penegakan Hukum	68
BAB III	76
TINJAUAN HUKUM TENTANG KORPORASI ASING SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM BIDANG PERIKANAN	76
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	76
1. Pengertian Tindak Pidana	76
2. Pertanggungjawaban Pidana	79
3. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pidana	88
B. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Bidang Perikanan	89
1. Pengertian Korporasi	89
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi	95
3. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Bidang Perikanan	99
BAB IV	110
ANALISIS MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL MILIK KORPORASI ASING DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN TINDAKAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH	110
A. Konsistensi Penjatuhan Sanksi Penenggelman Kapal Milik Korporasi Asing Yang Melakukan Tindakan <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Perairan Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah	110
B. Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia	135

BAB V	177
PENUTUP	177
A. Simpulan.....	177
B. Saran	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183
MATRIX REVISI SKRIPSI	188



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan
2. Tabel 2.2 Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Illegal Fishing*
(tindakan yang melanggar alat)
3. Tabel 2.3 Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Illegal Fishing*
(tindakan yang melanggar dokumen)

